



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MANOKWARI
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA

SENIN, 8 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Manokwari Tahun 2020

PEMOHON

Sius Dowansiba, Mozes Rudy Frans Timisela (Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Manokwari

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Senin, 8 Februari 2021, Pukul 17.00 WIB – 17.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Achmad Dodi Haryadi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021:

Sius Dawonsiba

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ali Nurdin
2. Muhammad Agus Riza
3. Galih Faisal

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Emilianus Jimmy Ell
2. Rustam
3. Pither Ponda Barany

E. Termohon:

1. Abdul Muin Salewe (KPU Kabupaten Manokwari)
2. Hery Lolo (KPU Kabupaten Manokwari)
3. Fahry Rafly (KPU Kabupaten Manokwari)

F. Bawaslu:

1. Ibnu Mas'ud (Bawaslu Provinsi Papua Barat)
2. Nazil Hilmie (Bawaslu Provinsi Papua Barat)
3. Nurlaila Muhammad (Bawaslu Kabupaten Manokwari)
4. Syors A. Prawar (Bawaslu Kabupaten Manokwari)
5. Frederik Lobat (Bawaslu Kabupaten Manokwari)

SIDANG DIBUKA PUKUL 17.00 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang terakhir, sesi terakhir, dan hari terakhir untuk sidang pendahuluan pertama dan kedua mengadili Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Manokwari dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak.

Baik. Dipersilakan, Pemohon, untuk memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir untuk Pemohon, saya sendiri, Habel Rumbiak, S.H., SpN., Kuasa Hukum Pemohon. Kemudian, rekan saya secara daring Ivan Robert Kairupan, S.H. Kemudian, hadir juga secara dadik ... daring, Prinsipal atas nama Sius Dowansiba. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut ke Termohon!

4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Ali Nurdin, Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Manokwari. Bersama saya hadir Pak Abdul Muin selaku Ketua KPU Kabupaten Manokwari dan secara online hadir dari jajaran KPU Kabupaten Manokwari, Pak Hery Lolo dan Fahry Rafly, serta Kuasa Hukum Pak Muhammad Agus Riza, Galih. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut ke Pihak Terkait, silakan!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam persidangan, saya selaku Kuasa Hukum Emilianus Jimmy Ell, S.H., M.H., dan Rustam, S.H., kemudian secara daring dihadiri oleh Kuasa Hukum Pak Pither Ponda, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terakhir, Bawaslu, silakan!

8. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir di hadapan sidang Majelis yang Terhormat, saya Nurlaila Muhammad, Kordiv KPPS Bawaslu Manokwari, didampingi oleh pimpinan kami Kordiv Hukum, Pak Nazil Hilmie, Bawaslu Provinsi Papua Barat. Yang hadir secara daring, yaitu Ketua Bawaslu Provinsi, Ibnu Mas'ud, bersama Komisioner Bawaslu Manokwari yang lain, yaitu Syors A. Prawar dan Frederik Lobat. Diikuti juga oleh Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari, yaitu Fatmawati, Yopi Sopacua, Yudit Sabandafa, dan Jack Royer. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Sebelum disampaikan jawaban dari Termohon, kemudian keterangan dari Pihak Terkait dan Bawaslu, kalau ada renvoi silakan di awal disampaikan, tetapi sifatnya, sekali lagi, hanya bersifat typo tanpa ada hal yang menyebabkan perubahan substantif, ya? Kemudian kalau ada tambahan bukti, silakan! Sebelum persidangan ini usai.

Dengan demikian, saya persilakan kepada Kuasa Hukum Termohon untuk menyampaikan secara singkat, sekitar 10 menit. Silakan!

11. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya bacakan, izin, berkaitan dengan AP3 yang kami dapatkan mengenai persoalan Surat Kuasa asli dari Pihak Pemohon dan prinsipalnya, apakah sudah disampaikan kepada Mahkamah, Yang Mulia?

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ada.

13. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau begitu saya lanjutkan. Kami selaku Kuasa, dari dan karenanya bertindak untuk KPU Kabupaten Manokwari dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut.

Di halaman 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam eksepsi. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 karena selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah=14.614 suara atau 13,7% dari total suara sah. Sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar=2.132 suara atau 2%.

Angka 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Tabel, dianggap dibacakan.

Nomor 5. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 adalah=106.646 suara. Sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 2% x 106.646 yaitu=2.133 suara.

6, dianggap dibacakan.

Nomor 7. Bahwa dengan demikian, karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat ambang batas perolehan suara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sikap Mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 tidak menerima permohonan yang melebihi ambang batas selisih perolehan suara. Bahwa terkait dengan persoalan ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi

telah membahas dan menguraikan secara komprehensif argumentasi hukumnya, dimana pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017.

9, 10, 11 dianggap dibacakan dan seterusnya sampai dengan halaman 10 angka 22. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut maka dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut.

- a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158
- b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158
- c. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan.
- d. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan.

21 dianggap dibacakan.

22 dianggap dibacakan.

23 bahwa berdasarkan sikap tegas Mahkamah tersebut, maka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pemilihan karena dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan penetapan perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan dengan aman dan lancar pada setiap TPS. Bahkan dalam permohonan Pemohon sekarang ini, Pemohon tidak sedikitpun membahas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

24, 25 dianggap dibacakan dan seterusnya.

Halaman 2 ... 14 b, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara ... dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Petitem. Memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pada faktanya, permohonan Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan petitem Pemohon tidak menuntut adanya perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Lanjut ke halaman 17 angka 39. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada adanya pembagian uang adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan kapan pembagian uang tersebut terjadi, dimana tempat kejadian penyerahan uang, bagaimana penyerahan uang tersebut dilakukan dan siapa saksinya. Begitu pula dalil Pemohon yang merujuk kepada bantuan keuangan yang dilakukan oleh Dr. Edi Budoyo kepada jemaat GKI Adomia. Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan antara pembagian uang tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon secara signifikan.

Bahwa dalil Pemohon mengenai penyerahan SK honorer Pemda Kabupaten Manokwari kepada calon PNS yang dilakukan pada tanggal 19 adalah dalil yang tidak jelas. Apa hubungan antara penyerahan SK tersebut dengan signifikansi perolehan suara pasangan calon.

40, 42 dianggap dibacakan.

43 bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, perselisihan hasil pemilihan harus signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang mempengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi ketika kasus yang diajukan oleh Pemohon ternyata di TPS dimana lokasi kasus yang dituduhkan terjadi, Pemohon unggul memperoleh suara yang lebih besar dari Pihak Terkait. Sehingga dalil Pemohon menjadi tidak beralasan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel tersebut.

Ada 8 TPS dimana Pemohon unggul di 6 TPS. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas atau obscur libel karena pokok permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 6 Tahun 2020 sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan, proses pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara, sudah dilaksanakan dengan benar, berjalan aman, tertib dan lancar.

47, 48, 49 dianggap dibacakan.

Bantahan terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh uraian dalil yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya mem ... Pemohon mempersoalkan mengenai adanya praktik penyerahan uang kepada sejumlah KPPS, penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI

Adonia, penyerahan SK honorer Pemda Kabupaten Manokwari. Tuduhan praktik penyerahan uang kepada sejumlah KPPS adalah tidak berdasar karena tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon. Selain itu, Termohon belum pernah menerima putusan pengadilan yang menyatakan adanya peristiwa pemberian uang kepada penyelenggara pemilu yang merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan. Bahwa seandainya benar tuduhan Pemohon, maka penerimaan uang tersebut adalah merupakan sikap pribadi yang tidak berhubungan dengan kelembagaan, penyelenggara pemilihan pada tingkat TPS, sehingga tindakan penerimaan uang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi, baik secara perdata maupun pidana.

Berdasarkan surat pernyataan dari para petugas KPPS di berbagai TPS yang dituduhkan, mereka menyatakan tidak pernah menerima uang dari Koordinator Tim Pasangan Nomor Urut 2. Selain itu, mereka juga menyatakan mereka telah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Bahwa dengan demikian, tuduhan adanya pemberian uang kepada petugas KPPS adalah tuduhan yang tidak berdasar karena tidak berhubungan dengan hasil perolehan suara pasangan calon oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar oleh karenanya harus dikesampingkan.

62. Bahwa selain itu, dalil pembagian uang kepada KPPS di Kampung Arowi dan Kelurahan Sowi tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pelanggaran dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon karena justru Pemohon diuntungkan dengan perolehan suara yang lebih unggul daripada Pihak Terkait, tabel 04 halaman 24 dan 25 dianggap dibacakan. Bahwa dari tabel perolehan suara di atas, dapat diketahui bahwa 6 dari 8 TPS yang KPPS-nya dituduh oleh Pemohon menerima pembagian uang, ternyata perolehan suara Pemohon unggul di atas perolehan suara Pihak Terkait.

Yang lain dianggap dibacakan. Langsung kepada halaman 36. Tuduhan penyerahan bantuan keuangan kepada jemaat GKI Adonia adalah tidak berdasar karena tidak pernah ada temuan, laporan, ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon. Begitu juga mengenai tuduhan penyerahan SK honorer kepada ... SK honorer Pemda Kabupaten Manokwari adalah tuduhan yang tidak berdasar karena Termohon tidak pernah menerima laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari. Ada surat Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 001 perihal hasil penanganan pelanggaran pemilu yang pada pokoknya laporan yang dilaporkan tidak cukup bukti dan tidak diregistrasi.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.50 WIT. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum, Ali Nurdin, S.H., M.H., Muhammad Alfarizi, S.H., M.Hum., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Subagio Ari Darmo, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar, S.H., Muhammad Agus Riza, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rahmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Piferofina, S.H., M.H., Bagyan S.H., M.H., Galih Faisal, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Harryan Wicaksana, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih. Dilanjutkan sekarang Pihak Terkait, silakan juga sama waktunya sampaikan pokok-pokok sekitar 10 menit, ya.

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Terima kasih, Yang Mulia, kami menyampaikan pokok-pokoknya saja. Dalam eksepsi, menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan yang diajukan oleh Pemohon karena dalam pokok permohonan dictum b tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi menyebutkan permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati. Akan tetapi dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 1, angka 2 maupun angka 3 menguraikan tentang sengketa proses pemilihan, hal mana menurut Pihak Terkait bahwa sengketa proses pemilihan umum bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilihan umum. Karena pokok permohonan Pemohon tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahapan proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi

Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 dan seterusnya. Sehingga di dalam posita Pihak Terkait pada angka ke-2. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon tidak merincikan dengan jelas dan cermat bagaimana terjadi selisih perolehan suara Pemohon dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon terdapat selisih suara sebanyak=14.630 suara. Dengan perolehan suara Pihak Terkait. Hal mana dalam I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada huruf B tak ada Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan terjadinya sengketa perselisihan perolehan suara. Akan tetapi, dalam pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara terperinci perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi, Pemohon lebih mendalilkan pelanggaran yang dituduhkan pada Pihak Terkait yang mana sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mana dalam pokoknya, Permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Bawaslu.

Ketiga. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian, yang kedua B. Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, dengan alasan bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi dalam register permohonan Nomor 71/PHP.BUP.XIX/2020 diketahui bahwa secara keseluruhan merupakan sengketa proses pemilihan umum yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan mengadili terjadi sengketa proses pemilihan umum, baik pelanggaran administrasi maupun terjadi pelanggaran lainnya yang kewenangan absolut adalah dari Bawaslu. Ayat (2) dan seterusnya kemudian dilanjutkan.

Bahwa perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Yang ketiga bahwa penduduk Kabupaten Manokwari berdasarkan penetapan agregat Kependudukan Kementrian dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa jumlah penduduk Kabupaten Manokwari adalah sebanyak=191.657 jiwa. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf A, Undang-Undang

Nomor 1 tahun 2015 dan seterusnya, sebagaimana Keputusan KPU di dalam SK Nomor 111 dan seterusnya, maka perolehan suara Pemohon sebanyak=46.016 suara. Sedangkan, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak=60.630 suara. Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak=14.614 suara. Sehingga, apabila dipresentasikan, maka selisih presentasi suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar=14.000 ... eh, 14%. Sebagaimana vide Bukti PT-8.

Kemudian, angka 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Pihak Terkait, suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat diajukan oleh Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi hanya sebesar=2.134 suara sah. Tetapi yang diperoleh suara sah oleh Pihak Terkait yakni=14.016 [*sic!*] suara. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan ini dengan Nomor Register Perkara 71/PHP.BUP/XIX/2021.

Angka 5. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing. Sebab Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana telah ditegaskan di dalam Pasal 158 ayat (2) huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 serta perubahannya. Dengan demikian, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkona ... berkenan menolak Permohonan Pemohon karena tidak berdasar hukum.

C. Tentang tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 tahun 2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Yang kedua bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.50 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.50 WIT sampai dengan tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.54 WIB. Namun, hingga pukul 24.00 WIB, Kuasa hukum Pemohon atas nama Ivan Robert Kaurupan, S.H. yang mengaku sebagai Kuasa Hukum Pemohon tidak menunjukkan surat kuasa khusus asli dari Pemohon Prinsipal sebagaimana daftar Bukti AP-3 Nomor 72/PAN.MK/AP3/XII/2020. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Vide Bukti PT-9.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan dibaca semua, Mas.

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Siap.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diambil pokoknya saja, ya.

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

b. permohonan Pemohon tidak jelas sebagaimana diuraikan bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang telah kami sampaikan oleh Pihak Terkait di atas bahwa itu merupakan kewenangan mutlak absolute dengan Bawaslu, sehingga menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas (obscur libel).

Kemudian angka kedua, dianggap dibacakan. Dan angka ketiga. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dan cermat penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun, lebih mendalilkan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait yang mana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti (...)

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan seterusnya.

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Undang-undang dan seterusnya. Menurut Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak oleh Mahkamah. Vide bukti ... maaf. Pokok perkara. Dalam permohonan ... apa ... keterangan Pihak Terkait halaman 7 sampai dengan halaman 11. Dalam pokok permohonan. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur (...)

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja!

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Bupati dan walikota dianggap dibacakan. Antara Pihak Terkait dan Pemohon. Namun, Pemohon pada angka 3b sampai dengan 3g, Pemohon tidak menguraikan kerugian suara Pemohon dalam perhitungan di TPS atau rekapitulasi perhitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Manokwari.

Kemudian, angka 2 dan lampiran tabel sebagaimana disampaikan, Yang Mulia. Bahwa perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tabel di atas, Vide Bukti PT-1, PT-2, dan PT-3.

Kemudian angka ketiga. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 3 huruf b, Pemohon mendalilkan adanya penyerahan sejumlah uang kepada ketua KPPS sebesar Rp5.000.000,00 dan kemudian dilakukan konferensi pers oleh DPD, GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) Manokwari. Bahwa seolah-olah hal tersebut benar adanya. Akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada para pihak oleh Gakkumdu dan Bawaslu Kabupaten Manokwari diketahui bahwa laporan itu tidak benar dan bahkan Ketua GMPK Manokwari kemudian melakukan siaran pers untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua PWKI Papua Barat dan keluarga besar Wondiwoi dan Pihak Terkait. Vide Bukti PT-10.

Keempat. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 3 huruf c. Pemohon mendalilkan adanya penyerahan bantuan dana sebesar Rp500.000.000,00 oleh Drs. Edy Budoyo kepada jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi dan seterusnya. Namun kami sampaikan bahwa (...)

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lebih dipersingkat, Mas!

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Disampaikan bahwa (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lebih dipersingkat, ya.

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Ya. Tidak dapat dikabulkan seluruhnya. Artinya dari permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kegiatan penyerahan dana tersebut adalah realisasi dari permohonan proposal yang diajukan oleh jemaat GKI Adonia Wosi yang hanya dikabulkan sebesar Rp500.000.000,00 yang mana dianggarkan dalam APBD induk Kabupaten Manokwari tahun 2020.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut, lima! Singkat!

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Bukti PT-7. Kemudian lima. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada angka 3 huruf d permohonan Pemohon adanya penyerahan SK tenaga honorer Pemda Manokwari oleh Drs. Edy Budoyo selaku Pela Kabupaten Manokwari. Namun yang kami sampaikan bahwa penyerahan SK tersebut merupakan SK tenaga pengajar buruh kontrak yang jangka waktu yang berlaku setiap tahun dan diperpanjang setelah dilakukan evaluasi. Sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut ke ini, ya, 8.

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Kemudian enam, tujuh (...)

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Dianggap dibacakan. Kemudian di delapan. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 3 huruf g, Pemohon mendalilkan telah melaporkan permasalahan ini kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap

dalil permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor 002/LP/PB Kabupaten Manokwari/34.05/XII/2020 (...)

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan seterusnya (...)

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 71/PHP.BUP-XIX.2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Dan seterusnya bahwa tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang menyatakan dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana ayat (1) bawasli ... Bawaslu provinsi / Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan selain itu pula laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana Bukti PT-6.

Kemudian 9, pada petitum permohonan Pemohon angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Selain Mahkamah tidak memiliki kewenangan melainkan kewenangan KPU atas rekomendasi Bawaslu dan juga bagaimana perhitungan angka suara Pihak Terkait yang dihilangkan oleh Pemohon per-TPS sehingga menjadi kosong alias nol. Namun, perolehan suara Pemohon tetap pada ... tetap atau penuh sampai pada kesimpulan Pemohon (...)

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Langsung kepada petitum!

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 71/PHP.BUP-XIX.2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

3. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-KPT/9202/KPU/Kab/XII/2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember tahun 2020 pada pukul 22.50 WIT
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Emilianus Jimmy Ell M.H, Rustam, S.H., dan Pither Ponda Barany, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih. Sekarang Bawaslu, silakan! Ini sudah ada resumennya, ya? Ya silakan, Bu. Agak keras suaranya!

39. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Terima kasih, Yang Mulia. Izin sebelum membacakan resume, saya ingin menyampaikan renvoi, Yang Mulia, terkait dengan typo pada halaman 10 pada keterangan itu yang sebenarnya adalah nomor 051.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di halaman 10?

41. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Halaman 10, terkait dengan (...)

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

10 nih tabel, ya?

43. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Tidak, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang ini, kan? Keterangan Bawaslu dalam bentuk tabel halaman 10?

45. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Terkait dengan keterangan tambahan di luar pokok permohonan,
Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya? Halaman 8 di sini. Ya ... renvoinya mana?

47. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Renvoi surat rekomendasi PSU panwaslu (...)

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di poin berapa itu?

49. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Bagaimana, Yang Mulia?

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Poin berapa?

51. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Poin 1.3, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Iya poin 1.3?

53. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

He eh, itu nomor suratnya 051.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan 031?

55. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, Bu!

57. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Kemudian yang pada halaman 11 terkait dengan laporan hasil pengawasan (...)

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 11 enggak ada ini, di tempat saya itu adanya halaman 9 dan 10 tabel. Ibu mau ... yang mana lagi? Angka berapa?

59. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Halaman 9, Yang Mulia, mohon maaf.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Angka berapa?

61. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Halaman 9, laporan hasil pengawasan disesuaikan dengan dokumen pada bukti kami ajukan itu 13 TPS, Yang Mulia, di situ tertulis 16 TPS.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di angka berapa, Bu?

63. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Di angka 1.6

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PSU pada 13 TPS maksudnya?

65. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan!

67. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Oke. Ini sudah menjelaskan daftar alat bukti poin ... angka 9 dan angka 11, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di?

69. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Di daftar alat bukti angka 9 dan angka 11 ... untuk daftar alat bukti (...)

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan!

71. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Oke, terima kasih, Yang Mulia, saya izin menyampaikan keterangan kami bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 3 huruf b terkait dengan dugaan pelanggaran money politics pada KPPS TPS 01, 02, 03, 05, dan 06, Arowi, Kecamatan Manokwari Timur, Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut.

Bahwa status laporan dengan nomor teregistrasi 002/LP dan seterusnya dalam rapat pembahasan II Sentra Gakkumdu tanggal 16 Desember 2020 menyatakan untuk dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran money politics sesuai Pasal 73 juncto Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menyampaikan pemberitahuan tentang penghentian proses penanganan dugaan pelanggaran atas laporan a quo kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada pelapor dan juga kepada terlapor. Telah diuraikan pada halaman 2 sampai halaman 5 dengan vide Bukti PK-3.

Dua. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 3 huruf b dugaan pelanggaran money politics pada KPPS di TPS 01, 02, 03 Rendani Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut.

Bahwa status laporan Nomor 004/LP dan seterusnya terkait dugaan pelanggaran money politics tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat materiil.

Bahwa terkait syarat waktu pemenuhan kelengkapan syarat formal dan materiil telah disampaikan kepada pelapor dan oleh pelapor sampai pada batas waktu yang ditentukan, tidak dapat melengkapi syarat materiil sehingga laporan a quo diberikan status tidak dapat diregistrasi, adapun pada halaman 6 dengan vude ... vide Bukti PK-4.

Tiga. Bahwa status laporan Nomor 005/LP dan seterusnya terkait dugaan pelanggaran money politics pada jemaat gereja adonyawosi dan penyerahan SK honorer seperti yang ada pada dalil Pemohon angka 3 huruf c, tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat formal dan materiil. Bahwa terkait syarat waktu pemenuhan kelengkapan syarat formal dan materiil telah disampaikan kepada Kuasa Hukum pelapor dan oleh pelapor sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat melengkapi syarat formal dan materiil, sehingga laporan a quo diberikan status tidak dapat diregistrasi pada tanggal 28 Desember 2020 diuraikan pada halaman 6, 7, 8 dengan vide Bukti PK-5.

Empat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 telah sesuai dengan naskah D Hasil Kecamatan-KWK se-Kabupaten Manokwari berdasarkan hasil pengawasan panwaslu kecamatan se-Kabupaten Manokwari yang diuraikan pada halaman 2 dengan vide Bukti PK-1.

Demikian keterangan kami, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik, terima kasih. Saya konfirmasi pertama ke KPU walaupun tidak ada eksepsi dari Termohon, ya, KPU, mengenai pengumuman penetapan hasil rekapitulasi, itu dilakukan kapan?

73. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Izin, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

75. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Pengumuman kami pada saat kami (...)

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Penetapannya kapan? Penetapannya.

77. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Penetapan tanggal 16 Desember 2020.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

79. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Pukul 22.50 WIT kami melakukan *live streaming* dan langsung kami sampaikan juga kepada publik melalui *live streaming*.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di papan pengumuman ada?

81. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Kami langsung menggunakan media, main stream, besoknya.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Media main streaming, kemudian untuk ... anu ... di laman KPU?

83. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Kami pasang di laman KPU facebook KPU kabu ... KPU Kabupaten Manokwari.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan saya menggunakan ketentuannya dari PKPU juga tahapannya bahwa diumumkan ... sejak diumumkan itu dalam laman dan papan, gitu lho. Makanya, papannya ada, enggak?

85. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Kami mau ... mau mengumumkan di depan papan di kantor KPU.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada? Pada tanggal itu juga? Ada diumumkan di papan pengumuman pada tanggal itu juga, jamnya?

87. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Jamnya setelah kita melaksanakan ... setelah kita melakukan penandatanganan langsung setelah acara.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jam berapa itu?

89. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Sekitar pukul 23.00 WIT.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 23.00 WIT? Kemudian, di ... apa ... diunggah di laman KPU-nya?

91. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Pada saat ... pada saat pembacaan penetapan.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jam berapa itu?

93. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Itu pada saat dibacakan, 22.50 WIT.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

22.50 WIT, ya? Sudah masuk di laman KPU-nya?

95. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Eenggak ada gangguan jaringan pada waktu itu?

97. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Insyallah tidak.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian ini ... tadi dari Kuasa Termohon menyampaikan di halaman 19, itu kan ada yang menunjukkan bahwa yang menang itu justru beberapa adalah Pemohon, ya? Itu buktinya apa itu?

99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

C hasilnya kami lampirkan sebagai bukti, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti apa, Pak Ali?

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

C hasil.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

C hasil?

103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Ya, betul.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sama enggak, dengan di halaman 25?

105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Sama.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di halaman 25 kan diulangi lagi tuh?

107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Betul. Sama, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu C hasil semua?

109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Ya, betul.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

C hasil, ya?

111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Ya, dan kita pakai ukuran plano, sesuai dengan aslinya ukurannya.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

C hasil, ya?

Kemudian dari Bawaslu, ya. Ini di halaman ... ini ... ini saya pakai ini, ya, Bu, ya? Saya pakai yang ini, yang di ... bukan yang singkatan, bukan resumennya, itu tadi mengatakan 13 TPS PSU-nya? Betul ya, Termohon? Coba, Komisioner! Pemungutan suara ulang dilakukan di 13 TPS?

113. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Di 16 TPS.

114. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Izin, Yang Mulia. 16 TPS, tetapi yang saya renvoi itu terkait dengan dokumen yang saya sertakan laporan hasil pengawasan yang kami sertakan sebagai alat bukti adalah 13 TPS (...)

115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi 16 TPS, tetap tentu PSU-nya?

116. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Ya.

117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, PSU-nya tetap 16 TPS?

118. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Untuk laporan hasil pengawasan, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

120. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Ya. Yang PSU-nya tetap 16 (...)

121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, saya ulangi, 16 TPS PSU-nya?

122. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Ya.

123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya terkait dengan doku ... dokumennya ini (...)

124. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Dokumennya laporan hasil pengawasannya yang kami ... yang kami sertakan di sini hanya 13 TPS untuk pelaporan hasil pengawasan, ya.

125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

13 TPS untuk laporan hasil pengawasan, ya?

126. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Yang lain hanya menyertakan C-Hasil.

127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, ada perbedaan enggak, ini setelah PSU dan sebelum ... before-afternya? Ada enggak, perbedaan antara Pemohon dan Pihak Terkaitnya? Coba ... coba dari Bawaslu ... dari KPU. Di 16 TPS itu.

128. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Perbedaan ... izin, perbedaan (...)

129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi sebelumnya itu ... ini PSU kan sudah ada hasilnya, sebelum PSU?

130. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

PS ... PSU, tapi kami belum membu ... apa ... belum melakukan penghitungan.

131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, belum ada penghitungan?

132. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Benar ... benar, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ya. Jadi, ini penghitungan ini PSU untuk penghitungan suara ulang, ya?

134. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Jadi, penghitungan hanya dilaksanakan setelah kita melaksanakan PSU. Jadi, 16 TPS itu tidak melaksanakan penghitungan rekapitulasi di tingkat distrik atau kecamatan.

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

136. TERMOHON: ABDUL MUIN SALEWE (KPU KABUPATEN MANOKWARI)

Kami hanya melaksanakan penghitungan 16 TPS itu setelah melaksanakan PSU itu. Jadi, hasil yang kita bacakan adalah di ... yang telah melaksanakan PSU.

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada enggak, buktinya dari Termohon untuk yang 16 TPS ini?

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Belum kami ajukan karena tidak didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Demikian, Pak Ketua, Terima kasih.

140. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dalam perkara ini, Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-012?

141. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Betul, Yang Mulia.

142. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, benar?

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: EMILIANUS JIMMY ELL

Benar, Yang Mulia.

144. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-11, benar?

145. BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI: NURLAILA MUHAMMAD

Benar, Yang Mulia.

146. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemohon ada bukti tambahan, Bukti P-4, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-11A sampai dengan Bukti P-46. Pemohon, benar?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Benar, Yang Mulia.

148. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dengan catatan Pemohon mencabut Bukti P-41 dan Bukti P-45C, betul?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Benar, Yang Mulia.

150. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, dengan demikian persidangan ini dinyatakan selesai. Kemudian kapan sidang lanjutannya lagi tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya? Hari, tanggal, dan jamnya.

Cukup, ya? Cukup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.42 WIB

Jakarta, 8 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

